

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Sumber pembiayaan suatu negara terlihat dari sisi pendapatan yang diperoleh dari pemasukan negara tersebut. Dalam hal ini dimana ada pembiayaan pasti berhubungan dengan pengeluaran pemerintah mengenai belanja negara. Seperti halnya kebutuhan sehari hari di dalam belanja negara juga memiliki kebutuhan yang bersifat primer ada juga yang bersifat sekunder serta kebutuhan yang tidak terduga. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut agar antara pemasukan dengan pengeluaran dapat seimbang di

buat suatu kebijakan penyusunan rancangan anggaran yang kemudian di realisasikan menjadi anggaran.

Tabel 1. Ringkasan APBN, 2007-2013 (miliar rupiah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah	707.806,1	981.609,4	848.763,2	995.271,5	1.210.599,6	1.358.205,0	1.529.673,1
I. Penerimaan Dalam Negeri	706.108,3	979.305,4	847.096,6	992.248,5	1.205.345,7	1.357.380,0	1.525.189,5
1. Penerimaan Perpajakan	490.988,6	658.700,8	619.922,2	723.306,7	873.874,0	1.016.237,3	1.192.994,1
a. Pajak Dalam Negeri	470.051,8	622.358,7	601.251,8	694.392,1	819.752,5	968.293,2	1.134.289,2
b. Pajak Perdagangan Internasional	20.936,8	36.342,1	18.670,4	28.914,5	54.121,5	47.944,1	58.704,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	215.119,7	320.604,6	227.174,4	268.941,9	331.471,8	341.142,6	332.195,4
II. Hibah	1.697,7	2.304,0	1.666,6	3.023,0	5.253,9	825,1	4.483,6
B. Belanja Negara	757.649,9	985.730,7	937.382,1	1.042.117,2	1.294.999,2	1.548.310,4	1.683.011,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	504.623,3	693.355,9	628.812,4	697.406,4	883.722,0	1.069.534,4	1.154.380,9
II. Transfer Ke Daerah	253.263,2	292.433,5	308.585,2	344.727,6	411.324,8	478.775,9	528.630,2
1. Dana Perimbangan	243.967,2	278.714,7	287.251,5	316.711,4	347.246,2	408.352,1	444.798,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9.296,0	13.718,8	21.333,8	28.016,2	64.078,6	70.423,9	83.831,5
III. Suspen	(236,5)	(58,7)	(15,6)	(16,8)	(47,5)	0,0	0,0
C. Keseimbangan Primer	29.962,6	84.308,5	5.163,2	41.537,5	8.862,4	(72.319,9)	(40.094,2)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(49.843,8)	(4.121,3)	(88.618,8)	(46.845,7)	(84.399,6)	(190.105,3)	(153.338,0)
E. Pembiayaan	42.456,5	84.071,7	112.583,2	91.552,0	130.948,9	190.105,3	153.338,0
I. Pembiayaan Dalam Negeri	69.032,3	102.477,6	128.133,0	96.118,5	148.748,0	194.531,0	172.792,1
II. Pembiayaan Luar negeri (neto)	(26.575,8)	(18.405,9)	(15.549,8)	(4.566,5)	(17.799,2)	(4.425,7)	(19.454,2)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	(7.387,2)	79.950,4	23.964,4	44.706,3	46.549,3	0,0	0,0

Sumber : Data Pokok APBN, Kementerian Keuangan RI

Ringkasan APBN dari tahun 2007-2013 terdapat kekurangan pembiayaan ditahun 2007 sebesar 7387,2 dan kelebihan pembiayaan ditahun 2008-2011, sedangkan untuk ditahun 2012 dan 2013 APBN Indonesia tidak ada sisa lebih maupun kekurangan pembiayaan sehingga antara pendapatan dan pengeluaran mengalami *balance* atau seimbang.

Secara teoretis, ada empat cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan yaitu meningkatkan pajak dan harga sektor publik, mengurangi pengeluaran pemerintah, mencetak uang, dan utang baru pemerintah (Dornbusch, 1993). Namun, ada beberapa kendala saran teoretis tersebut. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pajak adalah basis pajak yang sempit, banyaknya transaksi informal,

dan sulitnya meningkatkan intensifikasi pemungutan. Meningkatkan harga sektor publik selain dapat meningkatkan penerimaan juga mengurangi subsidi sehingga dapat mengurangi distorsi pasar. Kebijakan penurunan subsidi sering menuai penentangan yang besar dari masyarakat dan menstimulasi inflasi. Pencetakan uang selain akan menstimulasi hiperinflasi juga tidak dapat dilakukan karena undang-undang menempatkan bank sentral independen dari intervensi pemerintah. Pilihan kebijakan pinjaman juga dihadapkan pada pilihan yang sulit diantaranya :

1. Pinjaman luar negeri menjadi tidak mudah, terutama setelah Indonesia memilih tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan IMF dan itu berarti utang ditumpukan pada sumber dalam negeri.
2. Pasar dalam negeri mungkin memiliki keterbatasan untuk menyerap kebutuhan utang pemerintah.

(Abimanyu, 2004).

Sehubungan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah yang terdapat pada tabel 1 mengenai ringkasan APBN, hal ini dilakukan pemerintah dikarenakan ekspansi fiskal dimana dengan menaikkan belanja negara dengan menurunkan pajak netto untuk meningkatkan daya beli masyarakat disaat perekonomian mengalami depresi dan pengangguran yang tinggi. Paham Keynesian (1936), menyarankan ekspansi fiskal untuk mendorong perekonomian. Keynes memandang ekspansi fiskal melalui proses angka pengganda akan meningkatkan pendapatan nasional. Preskripsi ini telah diterapkan Amerika dan Eropa untuk keluar dari krisis depresi ekonomi dan berhasil.

Paham Keynesian memandang bahwa aktifitas stimulus fiskal dalam bentuk defisit fiskal ini tidak akan memberi insentif negatif kepada investor.

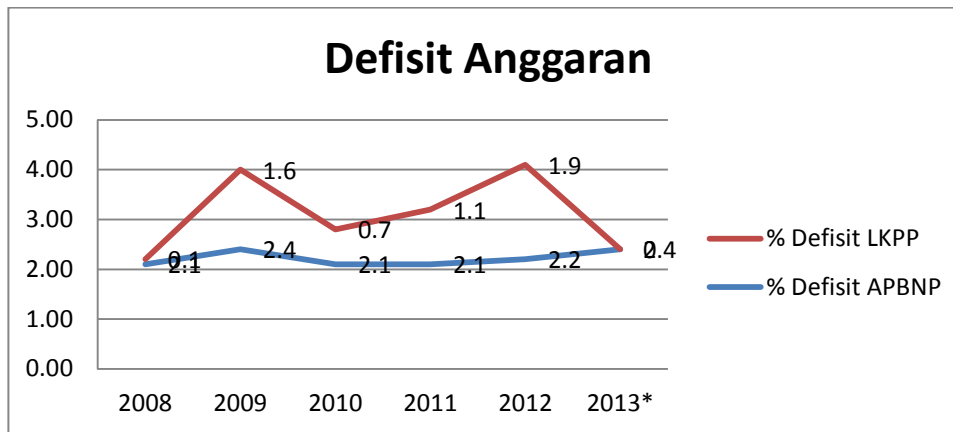
Pada sisi lain, paham Neo Klasik memandang bahwa defisit fiskal akan berdampak *crowding out* pada investasi dan berakibat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, paham Neo Klasik menyarankan untuk menghindari defisit fiskal dan mengurangi peran langsung dalam perekonomian. Pada masa sebelum krisis, elemen penting dari kebijakan fiskal pada saat itu adalah pengeluaran rutin dibelanjakan dengan penerimaan dalam negeri, baik berupa pajak maupun bukan pajak yang utamanya bersumber dari penerimaan sumber daya alam. Sedangkan pengeluaran pembangunan sebagian dibelanjakan dengan utang luar negeri (utang dalam negeri pemerintah belum ada) yang berupa pinjaman bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Pada tahun 1996, APBN menunjukkan surplus 1,9 persen dari produk domestik bruto, utang pemerintah terhadap luar negeri sebesar US\$55,3 miliar atau sekitar 24 persen dari PDB. Pada saat itu, pemerintah belum memiliki utang dalam negeri. Realisasi APBN tahun 1997 Semester I mencatat surplus 1,8 persen dari PDB dan utang pemerintah tidak banyak berubah. Rasio utang luar negeri terhadap PDB sebelum krisis terbilang relatif kecil. Sebagai perbandingan, rasio utang tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata di Asia dan negara sedang berkembang (Boediono, 2004).

Situasi saat ini sangat memerlukan fiskal yang berkesinambungan dimana pelanggaran angka defisit wajar terjadi dan memang mau tidak mau harus dilakukan.

Persoalan defisit anggaran pada dasarnya selalu berkuat pada sumber dana apa yang bisa digunakan untuk menutupi. Dari sisi pengeluaran, pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan jalan melakukan penghematan di luar belanja rutin. Sementara itu, dari sisi penerimaan ada dua opsi yang bisa diambil yaitu apakah menggenjot penerimaan dari pajak ataukah menambah utang baru (Nota Keuangan, 2013).



Gambar 1. Perkembangan Defisit Anggaran 2008-2013 Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi defisit anggaran Indonesia dalam periode 2008-2012 selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBNP. Perkembangan defisit anggaran tahun 2008-2012 dan targetnya dalam APBNP 2013 terlihat dalam gambar 1 mengenai perkembangan defisit anggaran tahun 2008-2013. Dalam periode tersebut, beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut antara lain realisasi pendapatan negara lebih besar dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran atau realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara lebih rendah dari target/alokasi yang ditetapkan, namun persentase realisasi pendapatan negara lebih

tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja Negara (Nota Keuangan, 2014).

Defisit yang terjadi pada neraca keuangan Indonesia salah satunya diakibatkan oleh utang luar negeri yang masih menumpuk dari tahun ke tahun. Penanggulangan keuangan pemerintah Indonesia ialah dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah yaitu melaksanakan defisit pembiayaan anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menutupi keuangan pemerintah yang defisit, walaupun pada kenyataannya banyak menimbulkan kontroversi. Menurut Kartika (2006), pemerintah mempunyai tiga pilihan untuk menutup defisit anggaran APBN, yaitu dari hasil privatisasi BUMN, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri ini merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara, walaupun sudah banyak upaya pemerintah dalam mengatasi hal ini tetap saja defisit anggaran terjadi dan pinjaman ini harus tetap dilakukan sebagai suatu kebijakan. Seluruh negara maju dan berkembang sudah pasti “lebih besar pasak dari pada tiang” dimana pengeluaran lebih banyak di bandingkan dengan pemasukan dari sumber dana suatu negara sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pinjaman dalam negeri Indonesia dilakukan untuk membiayai pembangunan dari berbagai sektor sehingga dapat memajukan perekonomian Indonesia. Sesuai dengan UU no 54 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah maka pemberi PDN ini antara lain : BUMN, pemerintah

daerah dan perusahaan daerah yang memberi pinjaman kepada pemerintah dalam bentuk surat berharga negara dan surat berharga syariah negara. Pinjaman dalam negeri Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu obligasi suku bunga tetap (*fixed rate*) dan obligasi dengan suku bunga yang selalu berubah (*variable rate*).

Pinjaman luar negeri dilakukan untuk menutupi *saving investment gap* dan dilakukan dengan cara melakukan pinjaman luar negeri. Apabila kebijakan pinjaman luar negeri ini diterapkan maka anggaran mengalami defisit, hal ini terjadi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan pemberian stimulus fiskal untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap akan memprioritaskan dan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan utang dari dalam negeri, yang dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mengoptimalkan peran serta dari masyarakat, mengembangkan pasar keuangan domestik, dan meningkatkan efek multiplier perekonomian nasional. Kebijakan tersebut ditempuh sejalan dengan terdapatnya risiko utang dalam negeri yang relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan risiko utang luar negeri. Pinjaman luar negeri digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu utang di pasar obligasi atau *bond market debt* (berupa obligasi RI0014) dan utang luar negeri pemerintah (*official debt*).

**Tabel 2. Posisi Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Indonesia Periode 2007-2013
(dalam juta US\$)**

Periode	Pemerintah			Jumlah
	Komersial	Bukan Komersial		
		ODA	Non ODA	
2007	18418	47663	14528	80609
2008	19952	56093	10555	86600
2009	31415	58342	9508	99265
2010	46032	61796	8775	116603
2011	48424	62120	8098	118642
2012	50365	60533	7428	118326
2013	62527	54660	6322	123509

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

Perkembangan posisi pinjaman luar negeri dari tahun 2007-2013 dapat dilihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengutang, masalah utang baik peranannya dalam pembangunan implikasi dan kemauan pembayaran bunga dan cicilan utang merupakan hal yang perlu dikaji lebih lanjut. Dengan mencermati ketahanan ekonomi Indonesia saat ini, sangat sulit mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan berkurang untuk setidaknya-tidaknya 10 tahun kedepan.

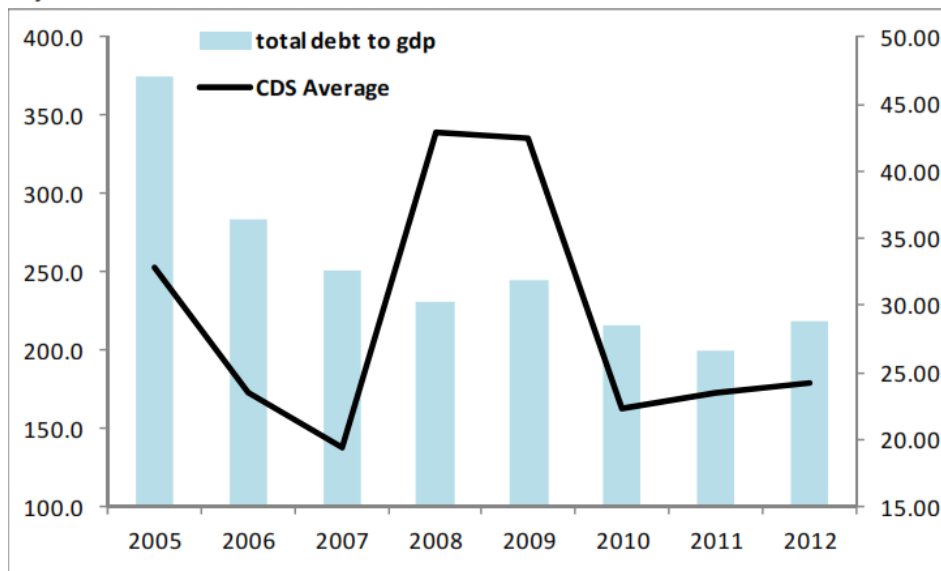
Hal ini disebabkan karena masalah utang luar negeri yang dihadapi Indonesia telah mencapai tahap yang demikian kompleks sehingga sulit untuk diupayakan pemecahan dalam waktu yang definitive. Sebagai negara berkembang yang tetap konsisten dalam politik pembangunannya, Indonesia untuk masa mendatang masih bergantung pada komponen ini. Seberapa besar tingkat ketergantungannya, tentu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Di sisi kebijakan moneter menurut Dennis (2004), bahwa portofolio utang yang optimal adalah portofolio utang yang terdiri dari utang luar negeri 100 persen. Namun, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan bahwa pinjaman luar negeri menimbulkan biaya kondisionalitas yang cukup besar. Hal ini disebabkan adanya persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman dari negara kreditur.

Selain itu, pinjaman luar negeri yang cukup besar dapat menimbulkan kesulitan di masa yang akan datang jika nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi yang besar. Dalam jangka pendek, pinjaman luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara akibat pembiayaan rutin dan pengeluaran pembangunan yang cukup besar. Tetapi dalam jangka panjang, ternyata pinjaman luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, apabila negara Indonesia dapat mengalokasikan pinjaman ini dengan baik maka dampak jangka panjang tersebut dapat di minimalisir.

Pinjaman luar negeri atau penerimaan pembangunan hanya disebut sebagai pelengkap dalam pengeluaran pembangunan maupun total APBN, namun semua utang luar negeri Indonesia itu tetap dan terus semakin besar setiap tahun dan setiap pelitanya. Mengenai ketergantungan Indonesia, khususnya dalam APBN pemerintah terhadap pinjaman luar negeri itu utamanya dalam hal pembangunan maupun dalam total APBN pemerintah. Pinjaman luar negeri tersebut tidak semuanya diberikan dalam bentuk rupiah (atau tepatnya mata uang asing tertentu), tetapi dalam bentuk bantuan

proyek dan bantuan program. Bantuan proyek diberikan dalam bentuk paket pinjaman berupa peralatan-peralatan, barang-barang ataupun jasa (konsultan asing) sedangkan bantuan program diberikan dalam bentuk uang tunai (Nota Keuangan, 2014).



Gambar 2.Rasio pinjaman terhadap PDB yang mendorong *Credit Default Swap*

Sumber : Bloomberg 2013

Rasio pinjaman yang rendah terhadap PDB mendorong nilai *Credit Default Swap* atau perlindungan proteksi atas risiko kredit untuk turun. Faktor fundamental diantaranya inflasi, PDB, keseimbangan fiskal dan neraca berjalan sangat dominan dalam mendorong pergerakan CDS karena kemampuan suatu negara dalam membayar pinjamannya tidak hanya menandakan bahwa negara tersebut cukup sehat secara fiskal, namun juga memiliki manajemen anggaran yang baik serta menjadi informasi yang diperhitungkan oleh pelaku bisnis. Faktor ini sesuai dengan laporan IMF (2013), yang mengkonfirmasi pergerakan *spread* CDS dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental ekonomi salah satunya adalah rasio utang terhadap PDB.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan pinjaman luar negeri untuk pembangunan nasional. Kebijakan mengambil pinjaman baru untuk menutup pinjaman lama telah membawa Indonesia masuk pada perangkap utang (*debt-trap*) dan berpotensi mengalami *debt-crises* atau krisis utang.

B. Permasalahan

Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi artinya pendapatan nasional juga meningkat dan memungkinkan pendapatan perkapita juga meningkat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat yang meningkat pula. Sejak krisis ekonomi, Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk melakukan pinjaman luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian tetapi sampai saat ini pinjaman luar negeri pembiayaan yang dilakukan justru untuk menutupi pinjaman masalah yang belum habis.

Setiap tindakan ekonomi pasti mengandung berbagai konsekuensi, begitu pula halnya dengan tindakan pemerintah dalam menarik pinjaman, baik pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Dalam jangka pendek pinjaman luar negeri dapat menutup defisit anggaran dan hal ini jauh lebih baik di bandingkan dengan mengeluarkan kebijakan pencetakan uang baru yang beredar yang akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi sehingga pengeluaran pemerintah akan berlebih karena membutuhkan banyaknya modal tanpa di sertai dengan efek peningkatan tingkat harga umum.

Besar kecilnya pinjaman yang dilakukan oleh negara berkembang disebabkan karena adanya deficit current account, kekurangan dana investasi pembangunan yang tidak dapat ditutup dengan sumber dana dalam negeri, angka inflasi yang tinggi dan tidak efisien struktur dalam perekonomian. Beban pinjaman luar negeri dapat diukur salah satunya dengan melihat proporsi penerimaan devisa pada neraca berjalan yang berasal dari ekspor yang diserap oleh seluruh *debt service* yang berupa bunga dan cicilan utang. Jika rasio antara penerimaan ekspor dan *debt service* menjadi semakin kecil, atau *debt service ratio* (jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor) semakin besar, maka beban pinjaman luar negeri semakin berat dan serius.

Penelitian ini akan menguji secara empiris instrumen fundamental diantaranya :

1. Apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia ?
2. Apakah PDB berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia ?
3. Apakah keseimbangan fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia ?
4. Apakah neraca berjalan berpengaruh secara signifikan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh PDB terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
- c. Menganalisis pengaruh keseimbangan fiskal terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
- d. Menganalisis pengaruh neraca berjalan terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Manfaat penelitian, sebagai salah satu syarat kelulusan penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- b. Manfaat ilmiah, untuk memahami dan mendalami masalah-masalah di bidang ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan pinjaman luar negeri serta defisit anggaran Indonesia.
- c. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah serupa.
- d. Manfaat kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan fiskal agar dapat menekan pinjaman luar negeri yang berlebih.

D. Kerangka Pemikiran

Pinjaman luar negeri merupakan konsekuensi biaya yang harus dibayar sebagai akibat pengelolaan perekonomian yang tidak seimbang, ditambah lagi proses pemulihan ekonomi yang tidak komperhensif dan konsisten. Pada masa krisis ekonomi, pinjaman luar negeri Indonesia termasuk pinjaman luar negeri pemerintah telah meningkat drastis. Sehingga, pemerintah Indonesia harus menambah pinjaman luar negeri yang baru untuk membayar pinjaman luar negeri yang lama yang telah jatuh tempo (Kartika, 2006).

Akumulasi pinjaman luar negeri dan bunganya tersebut akan dibayar melalui APBN dengan cara mencicilnya pada tiap tahun anggaran. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang, sehingga akan membebani wajib pajak di Indonesia. Untuk memaksimalkan pemanfaatan kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka diperlukan modal dan teknologi untuk mengeksplorasinya agar kegiatan pembiayaan kegiatan ekonomi dalam negeri tidak hanya tergantung pada pinjaman luar negeri saja. Maka dari itu, pemerintah harus gencar dalam melakukan investasi secara maksimal.

Terdapat beberapa indikator pasar keuangan yang digunakan pasar keuangan yang sering digunakan oleh analisis pasar keuangan atau investor dalam menilai pinjaman luar negeri suatu negara penerbit utang. Indikator-indikator tersebut secara umum memberikan gambaran atas pengelolaan pinjaman luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, menunjukkan dengan baik tinggi rendahnya risiko gagal bayar. Beberapa

indikator yang sering digunakan dalam lingkup Internasional antara lain *yield* dari obligasi global pemerintah, *yield* dari obligasi global korporasi, *yield* komposit, *spread* atau penyebaran *Credit Default Swap* (CDS), *credit rating*, *credit worthiness*, dan rasio keuangan. *Yield* dari suatu obligasi menggambarkan risiko gagal bayar dari pemerintah atau negara penerbit utang dalam melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan.

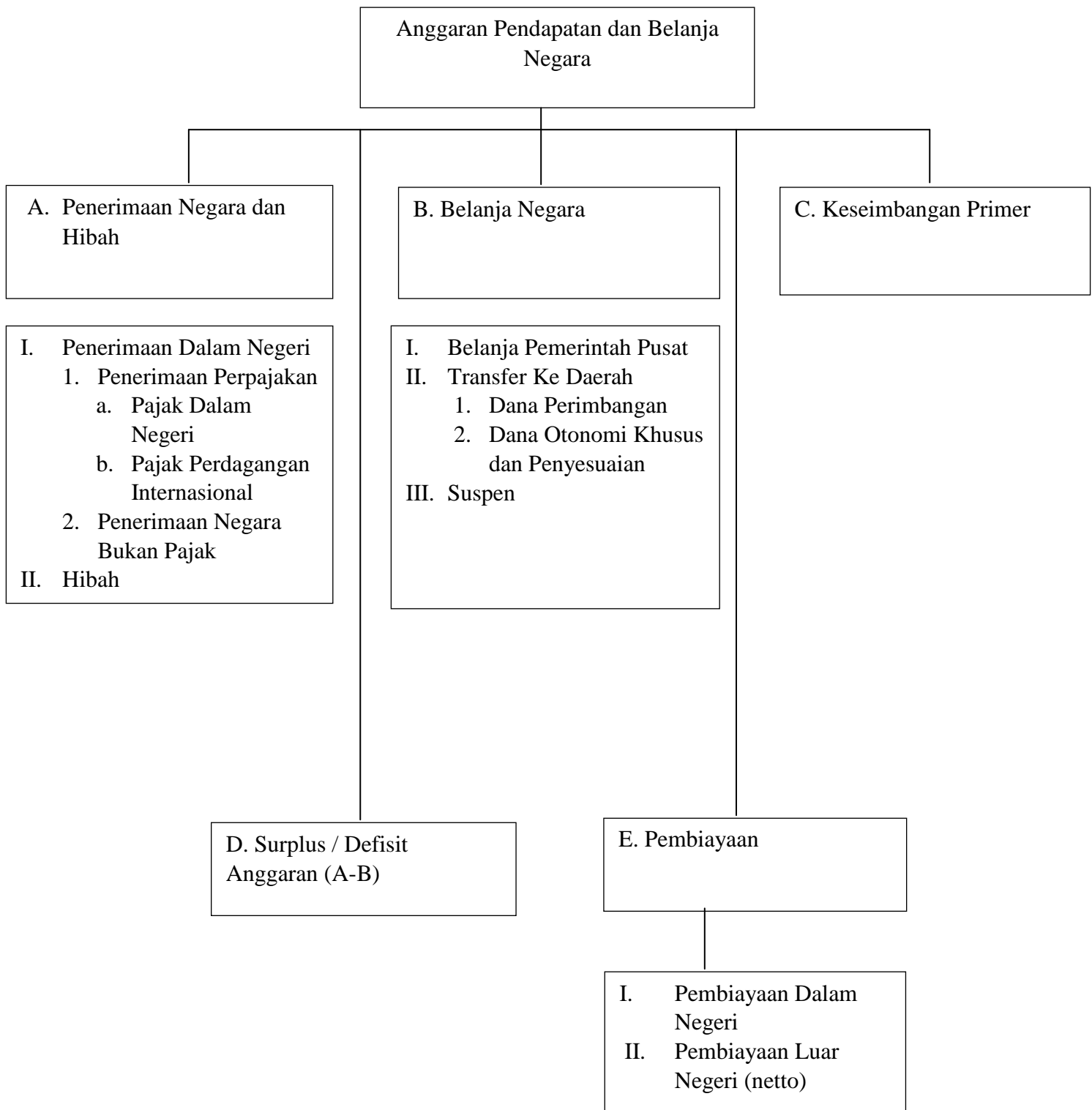
Hasil penelitian Reinhart, Rogoff, dan Savastano (2003) membuktikan bahwa batas aman rasio pinjaman luar negeri (pemerintah dan swasta) terhadap PDB negara berkembang adalah 15-20 persen. Apabila portofolio pinjaman pemerintah Indonesia keseluruhannya (100 persen) dikonversi menjadi pinjaman luar negeri, maka rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB Indonesia tahun 2004 sebesar 52,2 persen. Angka ini cukup tinggi, sehingga menyebabkan risiko *default* Indonesia menjadi cukup besar. Kenyataannya rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB Indonesia saat ini sebesar 24,58 persen.

Apabila dibandingkan dengan batas aman rasio utang terhadap PDB menurut Reinhart, Rogoff dan Savastano (2003), angka 24,58 persen ini masih cukup berisiko. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk mengkonversi utang luar negeri ke dalam utang dalam negeri untuk menghindari terjadinya risiko krisis pinjaman luar negeri.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Goldman Sach diperoleh instrumen yang signifikan diantaranya PDB, amortisasi eksternal cadangan luar negeri, rasio hutang luar negeri, tingkat suku bunga internasional dan rasio ekspor terhadap PDB. APBN

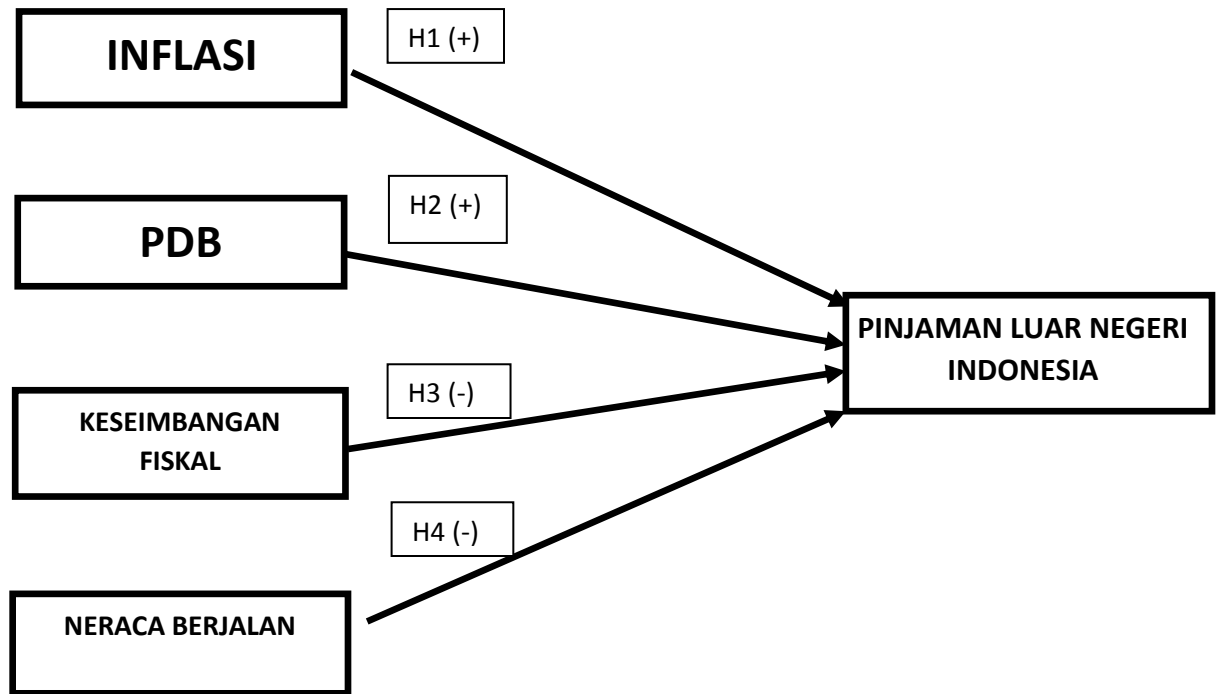
tahun 1996 menunjukkan surplus 1,9 persen dari PDB pinjaman luar negeri pemerintah sebesar US\$ 55,3 milyar atau sekitar 24 persen dari PDB. Pada saat itu, pemerintah belum memiliki pinjaman dalam negeri. Realisasi APBN tahun 1997 Semester I mencatat surplus 1,8 persen dari PDB dan utang pemerintah tidak banyak berubah (Boediono, 2004).

Rasio pinjaman luar negeri pemerintah terhadap PDB sebelum krisis relative kecil. Sebagai perbandingan, rasio utang tersebut sedikit lebih rendah dari rata-rata di Asia dan negara sedang berkembang. Angka pencapaian Indonesia pada waktu itu jauh lebih baik daripada Afrika, Asia tanpa China dan India dan negara-negara pengutang parah (*Heavily Indebted Poor Countries*).



Gambar 3. Pos APBN Pemerintah Indonesia

Sumber : Nota Keuangan 2014



Gambar 4. Kerangka Pemikiran Pengaruh Inflasi, PDB, Keseimbangan Fiskal dan Neraca Berjalan terhadap Pinjaman Luar Negeri Indonesia

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai konsep-konsep yang dapat dinilai benar atau salah untuk di uji secara empiris (Cooper dan Emory, 1996). Jadi, dapat diartikan bahwa hipotesis merupakan rumusan mengenai hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yang masih belum teruji kebenarannya dan bersifat sementara.

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga tingkat inflasi signifikan dan berpengaruh positif terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
2. Diduga PDB signifikan dan berpengaruh positif terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
3. Diduga keseimbangan fiskal signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.
4. Diduga neraca berjalan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pinjaman luar negeri Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul, penulis menyusun ringkasan setiap isi, dan bab per bab yang dibagi dalam lima bab yang diawali dari :

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari masalah yang muncul dan sistematika penulisan.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu.

3. BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, yang kemudian diuraikan menjadi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

4. BAB IV : Hasil dan Analisis

Dalam bab ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

5. BAB V : Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas, keterbatasan penelitian, dan saran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.